

BETAWI PUNYE DISTRO: STRATEGI PERLAWANAN TERHADAP STEREOTIP INFERIOR

BETAWI PUNYE DISTRO: A STRATEGY OF RESISTANCE TO INFERIOR STEREOTYPES

Halimatusa'diah
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB - LIPI)
halimatusadiah8015@gmail.com

Abstract

Betawi is a local ethnic group in Jakarta that is labelled with inferior stereotypes. In the process of Jakarta's modernization, the Betawi people are increasingly marginalized due to development and are "not the owner of their own land". However, in the middle of the blurred portrait of the Betawi, a distribution outlet (distro) has emerged that carries the symbols of the Betawi Culture. In their hands, the symbols of Betawi culture are expressed through creative ways as a mode of expression of cultural identity in a multiethnic social space. The question that arises later is, what is the purpose of the BetawiDistro establishment? Through a qualitative approach, this paper aims to uncover the phenomenon of the emergence of this Betawi creative industry. This paper uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews, observations, and documentation studies as a method of collecting data to obtain an in-depth description of the phenomenon under study. This paper found that the presence of the current Betawi creative industry is a form of covert resistance to inferior stereotypes attached to them. This is also their effort to build a sense of collectivism and a manifestation of the existence of Betawi culture in the middle of a multicultural Jakarta community.

Keywords: Betawi, inferior stereotypes, existence of Betawi culture

Abstrak

Betawi adalah kelompok etnik lokal di Jakarta yang lekat dengan stereotip inferior. Di tengah modernisasi Jakarta, Orang Betawi semakin termarginalkan akibat pembangunan dan tidak menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Namun, di tengah-tengah potret buram tentang Betawitersebut, kini bermunculan *distribution outlet* (distro) yang mengusung simbol-simbol Budaya Betawi. Di tangan mereka, simbol-simbol budaya Betawi diekspresikan melalui cara-cara yang kreatif sebagai mode ekspresi identitas budaya di ruang sosial yang multi-etnik. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, untuk kepentingan apa Distro Betawi didirikan? Melalui pendekatan kualitatif, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap fenomena kemunculan industri kreatif Betawitersebut. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Tulisan ini menemukan bahwa hadirnya industri kreatif Betawi saat ini adalah sebagai bentuk perlawanan terselubung terhadap stereotip inferior yang dilekatkan pada mereka. Hal ini juga merupakan upaya mereka untuk membangun *sense of collectivism* dan wujud eksistensi Budaya Betawi di tengah masyarakat Jakarta yang multikultural.

Kata kunci: Betawi, stereotip inferior, eksistensi budaya Betawi

Pendahuluan

Betawi merupakan etnik lokal di Jakarta yang seringkali dinarasikan sebagai kelompok etnik yang terpinggirkan, tidak berpendidikan, malas, dan stereotip negatif lainnya (Kusumawardhani, 2012; Farlina, 2012; Nursyifa, 2018; Erwantoro, 2014). Bahkan beberapa pengamat yang sepakat dengan stereotip tersebut. Castles (1967:200) misalnya, menggambarkan Betawi dengan mengatakan "*the anak Betawi are for the greater part of the lower class*". Sebagai negara yang

memiliki ribuan kelompok etnik dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda, persoalan stereotip antaretnis memang akan selalu hadir menjadi bagian dari interaksi antarbudaya. Kendati masyarakat Indonesia mendasarkan diri pada ideologi perbedaan dalam keberagaman, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa praktik-praktik negatif atas dasar stereotip etnis masih dapat ditemui.¹ Menghadapi hal tersebut,

¹Di Bali misalnya, kelak "Baksonisasi Pulau Bali" mampu menguatkan *stereotype* dan

kelompok etnis yang berpotensi sebagai pihak yang tidak diuntungkan, akan berjuang untuk bertahan di tengah masyarakatnya yang beragam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi individu dan kelompok untuk dapat menunjukkan identitas mereka di tengah masyarakat yang multikultural.

Arus masuk penduduk dari bermacam-macam etnis ke Jakarta telah terjadi sejak tahun 1950-an—dimulaidengan program pembangunan untuk menjadikan Jakarta sebagai Kota Metropolitan untuk membuatnya setara dengan ibu kota bangsa-bangsa yang besar, seperti Bangkok, Singapura, atau Manila—hingga saat ini. Pembangunan dianggap merupakan suatu kebutuhan untuk memberikan kenyamanan bagi pengusaha dan wisatawan asing dan mampu bersaing dengan Singapura atau Ibu Kota lainnya (Blackburn, 2013: 294). Namun sayangnya, agenda modernisasi Jakarta ini tidak dibarengi dengan upaya menjaga etnik lokal dan budayanya. Derasnya arus pembangunan membuka peluang kerja yang luas. Akibatnya, migrasi penduduk menjadi hal yang tak terelakkan. Para pendatang kemudian berkembang menjadi lebih dominan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hal ini berimplikasi pada kemunduran orang Betawi sebagai etnik lokal. Orang Betawi semakin tenggelam dalam gemerlapnya Jakarta dan kalah bersaing dengan pendatang. Perlahan namun pasti, Orang Betawi semakin tersingkir oleh derasnya pembangunan. Sebagai etnik lokal di Jakarta, orang Betawi harus mengikhhlaskan tanahnya untuk dijadikan gedung-gedung bertingkat dan pusat kegiatan politik dan ekonomi. Padahal, hilangnya tanah menyebabkan hilangnya mata-pencarian Betawi yang notabene sebagai petani. Kehilangan tanah juga menyebabkan

prasangka etnis Bali bahwa orang Jawa telah merebut lahan ekonomi penduduk lokal. Hal ini pada akhirnya mendorong mereka melakukan resistensi terhadap pedagang bakso. Isu bakso tikus dan formalin dibalut dengan etnisitas, distereotipkan pada para penjual bakso yang berasal dari Jawa (Halimatusa'diah, 2018). Di tempat yang lain seperti di Yogyakarta, Orang Timur yang distereotipkan oleh penduduk lokal sebagai orang yang suka berkelahi, mabuk-mabukan, seringkali mendapat penolakan untuk menyewa kost di salah satu daerah di Yogyakarta karna dianggap dapat mengganggu kenyamanan penduduk lokal. Bahkan, mereka sampai ditempatkan di wilayah tertentu, seperti wilayah yang dekat dengan kantor kepolisian agar gerak-gerik mereka terpantau oleh pihak terkait (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kampung Panjen, Yogyakarta 10 April 2019).

hilangnya berbagai ritual budaya Betawi yang berakibat pada terkikisnya identitas budaya Betawi.

Dalam sejarah panjang “tertidur lama” kini kita melihat munculnya beragam kegiatan ke-Betawi-an dalam ruang-ruang sosial di Jakarta. Gejala yang paling tampak antara lain, meningkatnya beragam kegiatan-kegiatan ke-Betawi-an. Kita bisa melihat misalnya, kegiatan-kegiatan seperti Festival Budaya Betawi yang meningkat tajam dalam 5 tahun belakangan ini. Jika tahun 2010 hanya sekitar dua puluh perayaan festival Betawi, pada tahun 2015 jumlah kemarin jumlah perayaan kian meningkat menjadi sekitar enam puluhan perayaan festival di berbagai sudut Kota Jakarta. Selain itu, media-media tentang Betawi (misal, www.majalahbetawi.com, www.orangbetawi.com, www.kampungbetawi.com, www.betawikita.id) dan gerakan literasi Betawi (misal, Betawi Kita, Gelatik, Baca Betawi) juga marak bermunculan. Salah satu yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah kehadiran *Distribution Outlet* (distro) Betawi yang dikelola oleh sekelompok generasi-generasi muda Betawi. Di tangan mereka, Simbol-simbol Betawi dikomodifikasikan dan ditransformasikan secara kreatif melalui bentuk-bentuk kekinian. Salah satu Distro Betawi yang konsisten dalam upaya untuk menghadirkan simbol-simbol budaya Betawi dalam setiap produknya adalah Betawi Punye Distro (BPD) di Kemayoran, Jakarta. Menariknya, pengelola BPD merupakan sekelompok anak-anak muda yang memiliki profesi masing-masing. Artinya, mereka bukan menjadikan BPD sebagai sumber mata pencarian utamanya. BPD merupakan salah satu upaya mereka untuk membangun *sense of collectivism* pada generasi muda Betawi di tengah-tengah himpitan modernisasi dan masyarakat Jakarta yang multikultural. “*Betawi kudu mendusin*,” demikian narasi yang selalu mereka gaungkan untuk membangkitkan semangat kolektivisme Orang Betawi.

Kajian tentang kelompok etnik lokal dalam merespon ketersingkirkan mereka memang bukanlah kasus yang khas, dalam arti masih ada kelompok etnis lain di Nusantara yang juga mengalami hal yang sama, seperti Ulun Lampung,² Masyarakat di Bali,³ dan kelompok

²Ulun lampung berupaya untuk merespon ketersingkirkan mereka dengan merevitalisasi tradisi *PiilPasenggiri* (Sinaga, 2014)

etnis lainnya di Indonesia (Sinaga, 2016; Atmadja, 2010; Sjaif, 2014; Buchari, 2014; Sinaga, 2014; Kumbara 2008).⁴ Namun, cara masing-masing kelompok etnik ini dalam merespon ketersingkirannya yang mereka alami sudah pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya sebagai buah dari perbedaan *setting* budaya dan sejarahnya. Posisi orang Betawi yang ter-*alienasi* akibat pembangunan yang tuna kebudayaan dan stereotip inferior yang dilekatkan pada kelompok etnik ini menyebabkan fenomena kebangkitan Betawi ini amat menarik untuk dikaji. Kuatnya stereotip inferior yang dilekatkan pada mereka tidak menjadikan mereka larut tenggelam di tengah-tengah masyarakat Jakarta yang multikultural, tetapi stereotip tersebut justru mereka kelola sebagai modal dasar untuk membangun narasi baru tentang Betawi.

Studi-studi tentang stereotip etnis biasanya lebih banyak dikaitkan dengan situasi diskriminasi maupun konflik antaretnis (Lampe & Anriani, 2017; Atmadja, 2010). Sementara itu, perhatian terhadap keberhasilan suatu kelompok

³ Masyarakat di Bali, mengadakan gerakan Ajeg Bali, sebagai upaya untuk merespon ketersingkirannya mereka dan krisis identitas akibat globalisasi dan dominasi Orang Jawa di ruang-ruang ekonomi (Atmadja, 2010)

⁴ Reformasi sistem politik nasional di bawah rezim Orde Baru yang sentralistik dan diberlakukannya Undang-Undang No 34 Tahun 2003 tentang otonomi daerah telah menjadi momentum penting bagi kelompok etnis di Indonesia, termasuk orang Sasak, untuk mengembangkan kesadaran dan solidaritas kelompok etnis dalam rangka melawan dan merebut dominasi suku bangsa lain, baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Gerakan indiginisasi dan adatisasi yang dilakukan orang Sasak belakangan ini, misalnya, dapat dipandang sebagai bagian dari proses politik identitas orang Sasak dalam merespons perubahan dan tantangan yang dihadapi atau tindakan semacam itu dapat dipandang sebagai salah satu bentuk strategi politik identitas para elite Sasak untuk merevitalisasi, meredefinisi, dan mereaktualisasi potensi sumber daya budaya, adat dan agama, yang selanjutnya akan dijadikan instrumen untuk meningkatkan kesadaran identitas “diri” dan solidaritas di antara mereka (Kumbara, 2008). Demikian halnya dengan Ulun Lampung, Melalui isu liberalisasi politik, otonomi daerah, dan desentralisasi kepegawaian, *ulun*Lampung meredefinisi dirinya, membangun ulang jati diri, menghidupkan klaim sebagai etnis lokal, dan memiliki teritori atas Lampung sehingga pada suatu saat mereka dapat mengatakan “inilah orang Lampung (Sinaga, 2014).

etnis dalam mengelola stereotip yang dilekatkan pada kelompok etnis tersebut masih jarang ditemukan. Padahal, di beberapa tempat di Indonesia, ditemukan kelompok-kelompok etnis yang mampu mengelola stereotip maupun stigma yang dilekatkan pada mereka menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong mereka bangkit dan menyejajarkan diri dengan pendatang (Sinaga, 2014; Atmadja, 2010). Upaya untuk menjelaskan, mempublikasikan, dan mentransfer kemampuan satu masyarakat dalam mengelola hal tersebut juga masih jarang dilakukan.

Tulisan ini ingin mengisi kekurangan dan keterbatasan yang disisakan oleh studi-studi di atas, khususnya keberhasilan suatu kelompok etnis dalam mengelola stereotip yang dilekatkan pada mereka. Riset ini fokus pada bagaimana kelompok etnis Betawi mengelola stereotip yang dilekatkan pada mereka di tengah-tengah masyarakat Jakarta yang multikultural. Tulisan ini ingin menemukan *lessons learned* yang bisa dijadikan contoh di tempat-tempat lain. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai faktor yang menjadi penyangga keberhasilan mereka dalam mengelola stereotip inferior yang dilekatkan pada mereka. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberi informasi dan melengkapi hasil-hasil kajian tentang persoalan komunikasi antarbudaya, khususnya mengenai stereotip etnis di masyarakat Indonesia yang multikultural. Kajian ini sangat penting diketahui masyarakat luas mengatasi persoalan kultural yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana menciptakan kohesi sosial dan pemeliharannya dalam masyarakat Indonesia. Dari keduanya dapat diambil pelajaran dalam penguatan kohesi sosial di Indonesia. Hasil kajian ini dapat ditindak lanjuti penyusunan model-model pengelolaan stereotip etnis dalam perjumpaan kultural dan dapat mereplikasikannya pada daerah lain sesuai sifat dan kondisinya

Tulisan ini merupakan tulisan yang diangkat dari penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan menetapkan *distribution outlet* (distro) ‘Betawi Punye Distro’ (BPD) sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi untuk mengambil data-data tertulis yang mendukung fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis melalui *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifying* (Denzin dan Lincoln, 1994). Telaah dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi-

informasi terkait dengan persoalan penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Adapun *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk mengkonfirmasi data-data yang telah diperoleh, dan menggali informasi-informasi baru yang belum diperoleh dalam teknik lainnya.

Stereotip Etnis dalam Interaksi Antarbudaya

Betapa sering kita sadar dan mungkin secara tidak sadar menyatakan; “oh saya tahu banyak tentang kelakuan Orang Papua”, “Saya tahu betul cara pikir Orang Sunda”, dan seterusnya. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan dilakukan tadi adalah sikap kita terhadap Orang Papua dan Orang Sunda. Jika kita meletakkan sikap kita terhadap etnik itu di atas sebuah skala, maka akan terlihat demikian, suatu saat mungkin sikap kita itu positif, menyenangkan, membanggakan, tetapi di saat yang lain sikap kita itu negatif, kurang menyenangkan, atau menjengkelkan bak membuang orang itu ke tempat sampah.

Seringkali, cara pandang seseorang mewakili sikap orang itu terhadap orang lain, sama seperti petikan cerita di atas, kita memandang sesuatu lewat “jendela”, dan pandangan itu sangat bergantung pada apakah “jendela” yang kita pakai besar atau kecil. “Jendela” yang besar memungkinkan kita dapat melihat lebih luas, “jendela” yang kecil membatasi pandangan kita itulah gambaran tentang sikap kita tentang prasangka kita terhadap orang lain.

Dalam psikologi sosial, stereotip adalah pemikiran yang diadopsi secara luas tentang jenis individu tertentu atau cara perilaku tertentu yang dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan kelompok individu (McGarty, *et. al.*, 2002). Pikiran atau keyakinan ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan kenyataan (Judd, 1993; Cook, 1971). Dengan stereotip kita menyimpulkan bahwa seseorang memiliki keseluruhan karakteristik dan kemampuan yang kita asumsikan berlaku untuk semua anggota kelompok tersebut. Stereotip mengarah pada kategorisasi sosial, yang merupakan salah satu alasan untuk membangun sikap prasangka (dikotomi “kita” dan “mereka”) yang mengarah pada *ingroup* dan *outgroup*. Beberapa stereotip mungkin cenderung menyampaikan kesan negatif, walaupun ada juga yang positif. Berkembangnya stereotip bisa menjadi potensi yang menghambat dalam interaksi antarbudaya.

Pengalaman interaksi lintasbudaya yang melibatkan begitu banyak warna kulit (ras), etnis, bahasa ibu, agama, dan tentu saja negara bangsa selalu saja menjadi menarik jika dikaitkan dengan identitas etnis atau etnosentrisme masing-masing. Beragam identitas etnik tersebut dapat menjadi sumber stereotip yang muncul dalam relasi antaretnik dimasyarakat. Bagaimana stereotip ini mempengaruhi interaksi antar budaya dapat kita lihat misalnya melalui hubungan antara etnis Kaili dan Etnis Bugis (dalam Lampe & Anriani, 2017). Stereotip “Malas” adalah salah satu sifat yang sering disematkan pada etnik Kaili oleh orang luar etnik tersebut. Stereotip terhadap etnik Kaili tersebut, secara umum dapat ditemukan dari para etnik pendatang yang bermukim di Kota Palu. Masih banyak orang Bugis yang mempersepsi orang Kaili sebagai etnik yang malas bekerja sehingga sulit berkembang secara ekonomi dan politik. Sementara orang Bugis dianggap lebih rajin dengan bangun subuh, berangkat ke sawah dan ladang lebih pagi dan pulang lebih sore). Hal ini juga berlaku pada perempuan Kaili, mereka sering dianggap malas karena hanya membersihkan beras ketika hendak ditanak, berbeda dengan orang Bugis yang sejak gabah sudah digiling menjadi beras langsung dibersihkan lalu disimpan dalam tempat beras. Namun dibalik relasi sosial budaya yang sudah terjalin sejak lama tersebut, dalam konteks komunikasi antarbudaya masih terdapat banyak stereotip negatif, prasangka yang masing-masing disematkan pada kedua etnis ini acapkali menyebabkan ketegangan antaretnik (Lampe & Anriani, 2017).

Stereotip dapat menghambat komunikasi antarbudaya (Samovar dan Porter, 2013). Stereotip menghalangi keberhasilan komunikasi karena stereotip biasanya berlebih-lebihan, terlalu sederhana, dan menyamaratakan. Stereotip biasanya berkembang sejak awal kehidupan dan terus berulang dan diperkuat dalam suatu kelompok. Sebagai contoh, stereotip dan prasangka etnis Bali bahwa orang Jawa telah merebut lahan ekonomi penduduk lokal. Hal ini menimbulkan anggapan Orang Jawa telah “merampas periuk nasi orang Bali.” Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa banyaknya pendatang yang memasuki ranah nafkah yang diusahakan oleh orang Bali, mengakibatkan peluang nafkah orang Bali menjadi mengecil dan bahkan terpinggirkan

(Dwipayana, 2003).⁵ Realitas ini menjadi semakin kompleks dengan adanya peristiwa Bom Bali I dan II. Pedagang bakso yang beretnis Jawa dan identitas agama Islam yang melekat pada dirinya semakin memperkuat resistensi masyarakat Bali terhadap pedagang bakso. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong mereka melakukan resistensi terhadap pedagang bakso. Isu bakso tikus dan formalin dibalut dengan etnisitas, distereotipkan pada para penjual bakso yang berasal dari Jawa.

Etnik Betawi: dari Penyingkiran hingga Stereotip *Inferior*

Sebutan Betawi sebenarnya tidak populer sampai dengan tahun 1950-an (Saidi, 2010: 44). Sebutan Betawi baru populer di zaman Ali Sadikin di era Orde Baru. Menurutnya, orang asli Jakarta dahulu mengidentifikasi dirinya dengan sebutan *orang sini*, atau menyebut nama kampung kelahirannya, tidak menyebut diri sebagai Orang Betawi. Bahkan, pengarang Firman Muntaco tatkala menulis rubrik tetap di Berita Minggu pada tahun 1957, ia namakan rubriknya *Tjerman Djakarta*. Para pengasas Bamus Betawi sendiri pada zaman Orde Lama mendirikan perkumpulan bernama Anda, Arisan Djakarta. Lalu ada perkumpulan semasa diberi nama Permata, Persatuan Masyarakat Jakarta.

Dalam banyak kajian tentang pembentukan Etnis Betawi, beberapa akademisi di Indonesia banyak mengacu pada pendapat Lance Castles (1967), seorang sejarawan asal Australia yang pernah meneliti tentang penduduk Jakarta. Castles mengatakan:

“Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makasar, dan Ambon, serta suku-

suku pendatang, seperti Arab, India, Cina dan Eropa.”

Penelitian Castles (1967) menitikberatkan pada empat sketsa sejarah. *Pertama*, *Daghregister*, yaitu catatan harian tahun 1673 yang dibuat Belanda yang berdiam di dalam Kota Benteng Batavia. *Kedua*, Catatan Thomas Stanford Raffles dalam *History of Java* pada tahun 1815. *Ketiga*, Catatan penduduk pada ensiklopedia van Nederlandsch Indie tahun 1893. *Keempat*, sensus penduduk yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930. Castles (1967) ingin mengatakan bahwa suku Betawi muncul karena adanya asimilasi budaya⁶. Mengenai hal ini, Ridwan Saidi, Budayawan Betawi, mengakui bahwa dalam proses pembentukan komunitas etnis Betawi lebih lanjut, memang ada semacam proses asimilasi dan akulturasi dari berbagai suku bangsa lain, seperti Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Ambon, Bali, Sumbawa, bahkan pendatang dari negeri lain, seperti Arab, Cina, dan Eropa (dalam Castles, 2017).

Dalam buku yang berjudul *Betawi Tempo Doeloe* Chaer (2015:10-11) seorang tokoh

⁶Asimilasi merupakan suatu evolusi dari sebuah proses pengambil alihan unsur-unsur (sifat) kebudayaan lain yang berbeda oleh sebuah kelompok atau individu. Proses ini disebut sebagai sebagai akulturasi, yakni suatu proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Lambat laun kebudayaan asing tersebut diterima dan diolah dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Adalah suatu hal yang menarik ketika melihat dan mengamati proses akulturasi tersebut sehingga nantinya secara evolusi menjadi Asimilasi yaitu meleburnya dua kebudayaan atau lebih, sehingga menjadi satu kebudayaan. Dalam asimilasi unsur-unsur budaya pembentuknya hanya sedikit terlihat karena telah membentuk suatu budaya baru. Akulturasi budaya dapat terjadi karena keterbukaan suatu komunitas masyarakat akan mengakibatkan kebudayaan yang mereka miliki akan terpengaruh dengan kebudayaan komunitas masyarakat lain. Selain keterbukaan masyarakatnya, perubahan kebudayaan yang disebabkan "perkawinan" dua kebudayaan bisa juga terjadi akibat adanya pemaksaan dari masyarakat asing memasukkan unsur kebudayaan mereka. Akulturasi budaya bisa juga terjadi karena kontak dengan budaya lain, system pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk maju, sikap mudah menerima hal-hal baru dan toleransi terhadap perubahan.

⁵Kasus ketersingkirkan masyarakat local diperlihatkan oleh temuan Erawan (Atmaja, 2010: 364) yang menunjukkan bahwa di kawasan *Kuta Square*, pemilik mal, toko, dan sejenisnya dikuasai oleh 70% pendatang. Gejala yang sama terlihat pula pada pasar Batukandik dan Pasar Anyar Sari di Kota Denpasar. Bahkan, sebagaimana disitir Harian Bali Post (Senin, 7 Februari 2005), 80% dari asset pariwisata Bali dimiliki oleh orang di Luar Bali dan Luar Negri (dalam Atmadja, 2010: 349).

Budayawan Betawi menuliskan pandangannya sendiri dalam melihat siapa yang dimaksud dengan etnis Betawi. Menurutnya, ada beberapa kriteria atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan etnis Betawi atau bukan, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan lokasi (tempat), pendekatan kesamaan bahasa, pendekatan agama (Islam), dan pendekatan campuran antara pendekatan lokasi dan agama. Pendekatan sejarah menyatakan bahwa orang Betawi atau etnis Betawi adalah etnis yang lahir dari pencampuran pernikahan berbagai etnis yang ada di Batavia pada abad ke-17 dan ke-18. Generasi yang lahir dari pernikahan campur ini tidak lagi mengenal etnis ayah-ibunya, sehingga mereka disebut orang Betawi (Castle 1967, Tjandrasmita 2004, Leirissa 2004, Suryomihardjo 1976, Lohanda 2004, dan Kanumoyoso 2007, 2011).

Pendekatan lokasi (tempat) menyatakan bahwa Betawi adalah nama tempat atau lokasi yang identik dengan Batavia pada masa VOC dan Hindia Belanda atau Jakarta sebelum proklamasi Kemerdekaan. Ada beberapa bukti bahwa Betawi sama dengan Batavia, antara lain dalam halaman kulit buku Lie Kim Hok (1884), yang berjudul *Melajoe Betawi*; ada keterangan "Tertjetak pada Toewan W. Bruining & Co., Betawi, 1884". Contoh lain dalam rubrik "Omong-Omong Hari Senen" pada surat kabar *Taman Sari* edisi 9 Mei 1904 menyebutkan nama *Asiten Residen Betawi*. Kiranya, para pribumi menggunakan istilah *Betawi*, sedangkan orang Belanda menyebutnya Batavia. Jika pendekatan lokasi yang digunakan untuk menyatakan siapa Orang Betawi, maka jelas Orang Betawi adalah Pribumi yang ada di Kota Batavia, yang oleh Residen Batavia disebut Bataviaan (Lohanda, 2004). Jadi, siapapun yang berada di luar Batavia bukan orang Betawi. Kiranya, donator responden yang disebut Shahab (2004) memiliki pemahaman seperti ini sehingga ia berpendapat bahwa orang Bekasi dan orang Rawa Belong bukanlah orang Betawi.

Pendekatan bahasa menyatakan orang Betawi adalah orang yang menggunakan bahasa Melayu Betawi. Lalu menurut hasil penelitian Muhadjir, dkk (1986), penggunaan bahasa Betawi bukan hanya di wilayah administrasi pemerintahan DKI Jakarta saja, tetapi sampai ke wilayah Tangerang di sebelah barat; wilayah Depok/Bogor di sebelah selatan; dan wilayah Bekasi disebelah timur. Jika pendekatan penggunaan bahasa juga dipakai, orang Betawi mempunyai wilayah kedudukan yang sangat

luas, termasuk komunitas Kampung Sawah di Pondok Gede yang beragama Kristen (Firmansyah, 2012) dan Komunitas Masyarakat Tugu yang beragama Kristen (Abdurrahman, 1975). Sebenarnya, Komunitas Tugu juga berbahasa Melayu dengan kosakata yang banyak diambil dari bahasa Portugis (Tadmor, 2007). Grijns (1991) juga melihat Betawi-ia menyebutnya Jakarta-dari penggunaan bahasa sehingga wilayah penelitian mulai dari Tangerang di sebelah barat, Cisalak disebelah selatan, dan Bekasi di sebelah timur.

Pendekatan agama melihat etnis Betawi dari agama Islam. Jika pendekatan agama yang digunakan-seperti yang dinyatakan Koentjaraningrat (1975: 4-5), Telden (1985:35), dan Abeyasekere (1985: 21)-makakomunitas di Kampung Sawah di Kampung Tugu bukanlah orang Betawi. Namun, Amsir (2011) dalam Kongres Kebudayaan Betawi pada penghujung 2011 yang lalu, menyatakan bahwa Betawi identik dengan Islam. Maka, Ia bukanlah Betawi jika bukan beragama Islam.

Berikutnya adalah yang menggabungkan pendekatan agama (Islam) dan lokasi (tempat). Jadi, seorang Betawi adalah yang tinggal di Kota Batavia (Jakarta sekarang) dan beragama Islam. Kiranya pendekatan inilah yang banyak dianut dan dipahami orang Betawi pada waktu yang lalu. Oleh karena itu, mereka menyebut dirinya orang Betawi atau orang Selam (Islam). Hal ini dinyatakan oleh Amsir (2011), Kuntowijoyo (1996) atau resensi bukunya berjudul "Tanpa Islam, bukan Betawi" dalam majalah *Plampang* edisi I tahun I, November 1996 (Chaer, 2015: 13).

Sementara itu, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) dalam Anggaran Dasarnya pasal 10 menyatakan bahwa ada empat kriteria orang Betawi, yaitu:

- (1) *Genetis*: Berdasarkan keturunan (bapak dan ibunya Betawi atau salah satunya Betawi).
- (2) *Sosiologis*: Orang yang berperilaku budaya Betawi atau menyandang kebudayaan Betawi dalam kesehariannya.
- (3) *Antropologis*: Seseorang yang peduli dan memiliki kepedulian terhadap budaya Betawi
- (4) *Geografis*: Masyarakat yang hidup dalam teritori budaya Betawi, yaitu Jakarta, sebagian daerah Bogor, sebagian daerah Depok, sebagian daerah Tangerang, sebagian daerah Bekasi.

Kriteria sosiologis, antropologis, dan geografis yang seperti itu membuka kesempatan bagi orang yang bukan bergaris keturunan Betawi menjadi orang Betawi asalkan mempunyai kepedulian atau hidup dalam teritori budaya Betawi. Namun, hal itu tidak sejalan dengan konsep Masyarakat Betawi yang disebutkan Pasal 9 sebagai berikut (Chaer, 2015: 14).

“Masyarakat Betawi adalah sekumpulan orang yang mengakui dan diakui sebagai penduduk asli yang membentuk komunitas kelompok etnis Kota Jakarta dan sekitarnya secara turun-temurun menyandang budaya Betawi, dan memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Betawi” (Chaer, 2015: 14).

Dalam rumusan tentang masyarakat Betawi disebutkan secara “turun-temurun menyandang Budaya Betawi”, padahal pada keempat kriteria diatas tidak ada klausulnya. Pada 2012, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan buku berjudul *Data Base Orang Betawi* berisi 485 orang Betawi, tetapi tidak dijelaskan apa kriterianya (Chaer, 2015: 11).

Dalam laju perkembangan Kota Jakarta, Orang Betawi, sebagai etnik lokal di Jakarta, kerap dipersepsikan sebagai kelompok etnik yang marginal (Blackburn, 2011:347; Kusumawardhani, 2012:109), karena sejarahnya yang dianggap sebagai masyarakat asli (pribumi) di Jakarta. Namun, mereka kini hidup di pinggiran Jakarta akibat pembangunan. Tidak heran jika kemudian Chaer (2015), seorang pengamat yang juga Budayawan Betawi mengatakan, bahwa kebudayaan masyarakat Betawi berada dalam keadaan utuh hanya sampai era 1950-an. Setelah era 1950-an, kebudayaan Betawi menjadi tidak utuh lagi karena pendukung kebudayaan itu, yaitu masyarakat Betawi, sudah mulai tercerai berai sebagai akibat dari pembongkaran kampung-kampung tempat tinggal orang Betawi untuk keperluan perluasan kota Jakarta dan penyediaan pemukiman-pemukiman baru seiring penduduk Jakarta yang semakin melimpah oleh pendatang (Chaer, 2015: V).

Ada sejarah “eksklusi” atas nama pembangunan ketika Betawi hanya menjadi penonton dalam gerak langkah pembangunan Jakarta⁷. Pembongkaran kampung-kampung Betawi sudah dimulai sejak 1949 untuk dibangun Kota

⁷Lebih jauh, pengusuran Betawi mulai abad 20, lihat buku sekitar 200 tahun sejarah Jakarta 1750-1945.

Satelit Kebayoran Baru. Pada waktu itu, tidak kurang dari 730 hektar perkampungan Betawi dibongkar, beserta 1.688 buah rumah, kandang ternak serta 700.000 buah pohon produktif milik orang Betawi (Shahab, 2004). Pembongkaran kedua dilakukan terhadap kampung Senayan dan Petunduan (nama kampung kedua ini sudah tidak dikenal lagi) untuk membangun fasilitas olah raga dalam rangka penyelenggaraan Asian Games. Setelah itu, pada akhir 1960-an, giliran kampung Kuningan dan Pondok Pinang dibongkar untuk fasilitas perkantoran dan perumahan mewah. Kemudian disusul pembongkaran di seluruh wilayah Jakarta tanpa terkendali (Chaer, 2015:VI).

Pembongkaran-pembongkaran ini berarti “memindahkan” orang Betawi ke tempat lain yang jauh di pinggiran Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Meskipun masih banyak Orang Betawi yang bertahan dan tinggal di dalam kota, tetapi budayanya sudah berubah. Jikapada awalnya mereka berkehidupan dari hasil tanah atau kebunnya, kini mereka harus hidup dari bekerja sebagai buruh, pegawai, dan pedagang kecil atau bekerja sebagai apa saja (Chaer, 2015: VI). Inilah yang disebut oleh Yahya Andi Saputra sebagai “kecelakaan sejarah” atas kebijakan pembangunan yang “ditoleransi” oleh orang Betawisendiri.⁸

Perubahan dari berkehidupan di kampung dengan tanah yang luas menjadi berkehidupan dalam kompleks perumahan dengan tanah yang sempit menyebabkan, misalnya, tidak ada lagi permainan anak-anak seperti *main dampu*, *main gala asin*, atau *main ketok kadal* karena ketiga permainan tersebut memerlukan lahan yang luas. Begitu pula, tidak ada lagi permainan yang memerlukan alat yang didapat dari kebun, seperti *main kuda-kudaan* atau *main bandring* karena tidak adalagi pohon pisang yang menjadi alat permainan. Selain itu, permainan *galeho* juga punah karena tidak ada lagi batang padi yang menjadi bahan baku permainan tersebut (Chaer, 2015: VI- VII).

Sebagai ibukota pemerintahan, Jakarta dibayangkan oleh Presiden Soekarno mempersonifikasikan semangat kekuatan bangsa-bangsa yang baru merdeka dari penjajahan, sebuah kota besar modern dengan bangunan, fasilitas dan kehidupan modern. Tidak semua

⁸Wawancara dengan Yahya Andi Saputra, Budayawan Betawi, 20 Oktober 2016.

keinginan Presiden Soekarno itu terwujud dimasanya, tetapi agaknya menjadi “takdir” bahwa Jakarta akan berkembang ke arah itu. Sejak awal Orde Baru, semasa Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta dari tahun 1966, ia meneruskan gagasan Bung Karno membangun Kota Metropolitan (Abeyasekere, 1989:113). Kebutuhan lahan untuk berbagai jenis fasilitas seperti perkantoran, perumahan, sarana kesehatan atau sarana olahraga semakin lama semakin meningkat dan telah menimbulkan persoalan pertanahan di kalangan orang Betawi, termasuk pembelian tanah penduduk secara murah atau secara paksa (Aziz, 2002:101-102). Namun dibalik itu, orang Betawi juga tidak sadar bahwa tanah merupakan fungsi Budaya. Padahal, tanah merupakan salah satu syarat keberlangsungan budaya. Hilang tanah, hilang pula tradisi dan identitas Betawi. Namun, pada masa itu, tidak ada perlawanan dari orang Betawi. Betawi yang toleran, merelakan tanahnya untuk dijual demi pembangunan Jakarta. Penggusuran di Jakarta yang tuna kemanusiaan, tuna kebudayaan, memperlebar jurang sosial dan meniadakan kelas sosial masyarakat lokal, sehingga mengalienasi keberadaan orang Betawi sebagai penduduk lokal.

Hal inilah yang menurut penulis kemudian memunculkan stereotip yang sangat kuat yaitu “Orang Betawi tukang jual tanah”. Padahal, menurut Palupi (2015)⁹ kalau kita berangkat dari titik *Human Right*, pernyataan bahwa “Orang Betawi tukang jual tanah” harus dilihat dalam konteks historisnya, “Betawi tukang jual tanah” -itu tidak titik (.) tetapi kalimat itu harus diberi tanda tanya (?) “Betawi tukang jual tanah?”, mengapa? Artinya kalimat itu belum selesai. Dalam perspektif *human right* seperti dikatakan Palupi sebagai berikut.

“Betawi jual tanah karena hak ekonomi, sosial, budaya orang Betawi tidak terpenuhi akibat pembangunan Jakarta dan Kapitalisme. Nahitu yang terjadi, orang Betawi jadi tukang jual tanah karena ada hak yang hilang atau dihilangkan, atau tidak terpenuhi atau bahkan dirampas. Sebaliknya juga ketiadaan tanah, atau hilangnya atas tanah membuat hak ekonomi sosial budaya orang Betawi tidak terpenuhi. Jadi ada multiplayer efek atas pelanggaran hak ekonomi sosial budaya. Jadi yang pertama adalah tidak terpenuhinya

⁹Disampaikan dalam diskusi Betawi Kita dengan tema “Betawi dan Tanah”, Komunitas Bambu Depok, 2015.

hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat Betawi membuat masyarakat Betawi ini tukang jual tanah. Ya kan? Sebaliknya ketika tanahnya sudah habis, orang Betawi kehidupan masyarakat Betawi atau status atau kondisi hak ekonomi, sosial, budayanya semakin parah. Jadi **ada proses pemiskinan** yang semakin parah dihadapi oleh masyarakat Betawi, dan itu sudah terjadi sejak jaman kolonial, prosesitu”.

Beberapa pengamat yang peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat Betawi mengidentifikasi beberapa penyebab ketersingiran orang Betawi dalam ruang-ruang sosial di Jakarta. Aziz (2002) dan Blackburn (2013) misalnya, menggambarkan bagaimana proses peminggiran yang terjadi pada masyarakat Betawi melalui berbagai peraturan yang dikenakan terhadap kepemilikan tanah mereka, diantaranya yang paling penting ialah izin mendirikan bangunan (IMB) dan pajak bumi bangunan (PBB). Karena hal inilah, banyak orang Betawi yang rumahnya dirobohkan pada dasawarsa 1970-an karena tidak memiliki IMB. Seperti di masa kolonial ketika perluasan jaringan jalan raya juga telah mengakibatkan harga tanah di pinggir jalan meningkat, perluasan jalan sesudah masa kemerdekaan pun memperlihatkan kecenderungan yang sama. Sebagai akibatnya, selain menghadapi persoalan IMB, Orang Betawi juga menghadapi masalah pembayaran PBB yang semakin besar jumlahnya dan menjadi gangguan serius bagi kemampuan ekonomi dari kebanyakan orang Betawi (Aziz, 2002:102; Blackburn, 2013).

Orang-orang Kuningan di Jakarta Selatan, yang pada dasawarsa 1970-an tergusur dari wilayah mereka, sebagian pindah ke daerah Mampang dan sebagian lagi ke Pondok Rangon, Pasar Rebo. Mereka pindah ke Mampang (yang sekarang sudah menjadi bagian dari Ibu Kota), meneruskan pekerjaan mereka dahulu, baik sebagai peternak sapi perah atau menjadi pembuat tahu-tempe. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik sejumlah rumah tepi jalan ramai di Mampang, terdapat peternakan sapi yang susunya diperah setiap hari atau pabrik Tahu dan Tempe. Demikian pula sebagian mereka yang pindah ke Pondok Rangon, meneruskan sebagai peternak sapi perah atau sebagai petani buah-buahan dan sayuran. Penduduk Mampang sendiri di masa lalu terkenal sebagai petani penghasil belimbing dan rambutan. Mereka yang bertahan di daerah perkotaan seperti Mampang dan tidak melanjutkan profesi lama, pada umumnya

bekerja sebagai pemilik rumah kontrakan atau membuka warung/toko dengan memanfaatkan sisa lahan didekat rumah tinggal mereka (Aziz, 2002:103).

Akibat lanjutannya ialah semakin banyak orang Betawi yang terpaksa menyingkir ke daerah pinggiran. Alih pekerjaan mereka yang lambat di sektor modern, menyebabkan mereka tetap setia kepada profesi lama di pemukiman mereka yang baru. Dalam perspektif sosial kemasyarakatan seperti itulah, orang Betawi kemudian tersisih dari kehidupan Kota Metropolitan Jakarta. Orang Betawi sendiri merasa, ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, meskipun tidak didasari secara umum apa bentuk kesalahan itu. Perasaan bersalah tersebut terbaca dalam tajuk sebuah majalah yang diterbitkan orang-orang Betawi berikut ini (Aziz, 2002:103-104).

“Jakarta, tampaknya tidak terlalu ramah buat sebagian besar kaum Betawi. Lihatlah berbagai fasilitas yang serba ‘wah’ di ibukota Negara ini, apa boleh buat menang, belum bisa dinikmati oleh penduduk asli Jakarta. Ironisnya, banyak diantara mereka-penduduk asli Jakarta itu-harus tergusur ke pinggir-pinggir kota. Pindah atau terpaksa pindah demi dan atas nama pembangunan kota yang kian cepat itu. Betawi makin menepi. Maka tak salah jika ada yang bertanya, adakah yang salah pada orang Betawi?” (Majalah Jendela Betawi,1990:4)

Castells (2007: 87-88) mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi penyebab ketersingiran orang Betawi di Jakarta. *Pertama*, kemungkinan terbesar penyebab ketersingiran mereka dari lingkaran atas kehidupan nasional adalah tingkat pendidikan mereka yang rendah. Sensus tahun 1930 menunjukkan bahwa wilayah Jakarta merupakan salah satu wilayah terbelakang dalam bidang pendidikan umum. Prosentase melek huruf di Batavia (11,9%) merupakan angka yang rendah bagi daerah perkotaan (sebagai contoh dibandingkan dengan Bandung, yaitu 23,6%). Selain itu, mereka yang melek huruf hampir bisa dipastikan bukan merupakan orang Betawi. Beberapa wilayah dengan tingkat melek huruf terendah di Jawa terdapat pada distrik-distrik pedesaan yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Distrik semacam ini mayoritas dihuni orang Betawi. Wilayah tersebut adalah Kebayoran(1,3%), Cikarang (1,3%), Parung (1,5%). Di luar wilayah

Jakarta Raya masih menunjukkan tingkat melek huruf yang jauh di bawah rata-ratanasional.

Kedua, keterbelakangan Orang Betawi mungkin juga berhubungan dengan asal usul mereka dan karakter pemerintahan Belanda di wilayah Jakarta yang berlangsung lama dan bersifat langsung. Suku Betawi mulai muncul dalam suatu lingkungan tempat semua peran elit yang lebih tinggi disediakan untuk suku lainnya. Seperti dikatakan Castles (2007: 87-88), memang benar bahwa pendahulu mereka memiliki unsur *elite*, yaitu para kepala kepala kelompok Melayu, Bugis, dan Bali dan *Condottieri* pemimpin pasukan, yang memimpin orang-orang suku mereka sendiri dan kadang kala menerima pemberian tanah yang cukup luas. Kecenderungan yang terjadi adalah tanah-tanah partikelir tersebut berpindah tangan pada orang-orang Eropa dan Cina.Selama abad ke sembilan belas, *ommelanden* Batavia diperintahkan secara langsung daripada bagian lain pulau Jawa. Orang Eropa memegang jabatan hingga ke tingkat *schout* atau *sheriff*, dan tidak ada bupati pribumi. Ketika para bupati diangkat pada abad keduapuluh, jabatan ini diisi oleh orang-orang yang berasal dari bagian lain pulau Jawa, sehingga tidak ada unsur *elite* Betawi diatas level demang atau *wijkmeester* (setara dengan lurah penyunting).¹⁰

Ketiga, Kehadiran Islam di Batavia mungkin juga turut berperan penting dalam masalah ini. Di masa kolonial di Batavia, unsur-unsur Kristen – orang-orang *Mardjiker*, Depok, atau Indo – berusaha meniru ras yang berkuasa dan berusaha keras untuk mencapai status Eropa, meskipun para penguasa segan untuk memberikannya. “Belanda Depok” terkenal dengan gaya Eropa mereka, dan banyak diantara mereka akhirnya mencapai status hukum Eropa pada tahun 1930.¹¹ Islam, sebaliknya, memberikan kenyamanan

¹⁰Ketiadaan kelompok elite penguasa itu bukan hanya dalam pos-pos tengahan (*middle range*) di jajaran Pemda DKI Jakarta. Menurut pengamatan Amri Marzali, di dalam Almanak Jakarta tahun1976 nampak bahwa “hampir semua pegawai tinggi pada kantor Pemda DKI Jakarta adalah orang yang lahir di luar Jakarta”. Sangat mungkin, setelah hampir dua dasawarsa berlalu, dewasa ini telah terjadi perubahan pada komposisi para pegawai tinggi itu, meskipun sulit dipantau secara akurat ke-betawi-an mereka. (Aziz,2002:115)

¹¹Lihat M. Buys “Depok” *De Indische Gids*, 1890, Vol. II hal. 1239 Buys mendiskripsikan orang Depok: “penampilan pria kurang menarik,

kepada penduduk mayoritas yang telah pasrah untuk menempati secara permanen tangga terbawah dalam jenjang sosial. Orang Betawi, yang secara kuat mengasosiasikan diri sebagai orang selam (Muslim) takut akan pendidikan barat karena mereka menganggapnya sebagai tahap pertama dalam Kristenisasi dan karena itu tidak mau mengikutinya (Castles, 2007:90-91).

Dalam pandangan Aziz (2002:115) sikap penarikan diri orang Betawi dari dunia modern dan identifikasi yang kuat terhadap Islam di masa penjajahan, telah menimbulkan ongkos sosial yang amat mahal, yang akibat-akibatnya masih terus terasa hingga hari ini. Akibat langsung ialah absennya kelompok elite yang mampu mengartikulasikan kepentingan politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam kehidupan Jakarta masa kini yang metropolis. KH. Syafi'i Hadzami seorang ulama terkemuka Betawi, merasakan ketidakmampuan orang Betawi untuk menyusun posisi tawar politik yang kuat, saat Letjen (Pur) M. Sanif, seorang putera Betawi yang dicalonkan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1992, gagal meraih jabatan "susah, orang Betawi nggak punya cantolan".

Absennya orang Betawi dalam pilkada Jakarta, semakin melegitimasi bahwa "Orang Betawi belum mampu menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri". Dalam ruang-ruang sosial, Betawi selalu dilekatkan dengan serangkaian stereotip negatif seperti, terbelakang, tidak berpendidikan, malas bekerja, dan stereotip negatif lainnya. Serangkaian narasi tersebut menjadikan Betawi lekat dengan identitas sebagai kelompok yang *inferior*. Bahkan, dalam banyak literatur, Betawi sebagai kelompok inferior seakan disepakati oleh banyak pengamat yang peduli terhadap kehidupan sosial Betawi. Dalam hal ini, beberapa pengamat seperti Milone (1966), Castels (1967) dan Abayasekere (1985)

mengenakan pakaian menurut gaya yang mirip orang Eropa, banyak diantara mereka yang menghabiskan waktu mereka untuk tidak melakukan apa-apa. Mereka yakin bahwa para pemilik tanah tidak layak untuk bekerja mengolah lahan dan secara umum pekerja kasar diberikan kepada orang-orang non-kristen. Kebencian mereka terhadap pekerjaan kasar ini... kadangkala didasarkan pada kebanggaan terhadap kepercayaan Kristen mereka. Dimana mereka sejauh mungkin berharap untuk menempatkan diri mereka sejajar dengan orang-orang Eropa di Hindia, yang hanya sesekali melakukan pekerjaan kasar yang sesungguhnya.

mengatakan (Milone,1966: 262: Castels,1967: 200,Abayasekere,1985: 21)

"They remained basically provincial, and are (sic) never in position to exploit what the town had to offer, and therefore could not play a significant role in the town economy" (Milone, 1966:262)

"Due to historical circumstances, the anak Betawi are for the greater part of the lower class" (Castles, 1967:200)

"The endangered nature of Betawi society has been recognized by urban authorities who have made recent efforts to preserve it" (Abayasekere, 1985:21)

Dalam pandangan orang Betawi sendiri, gambaran secara umum stereotip Betawi dilukiskan sebagai berikut: (1) Boros dan hanya memikirkan hari ini; (2) Suka menjual tanah warisan untuk keperluan yang tidak penting; (3) Ingin hidup senang, tapi tidak mau berusaha; (4) Cepat puas; (5) Konsumtif; (6) Suka memanjakan anak; (7) Kuat agama; (8) Patuh pada orang tua; (9) Rajin sembah yang dan mengaji; (10) Orientasi hidup untuk akhirat; (11) Bicara bebas; (12) Tidak ada stratifikasi kasi bahasa; (13) Bicara keras; (14) Berkelakuan kasar; (15) Cerewet; (16) Tidak mau kalah bicara; (17) Suka ngambek; (18) Menjauhkan diri dari golongan non-Islam; (19) Ramah; (20) Suka menolong sesama; (21) Terbuka dan demokratis; (22) Bersikap optimis; (23) Kurang memiliki kecemburuan untuk maju; (24) Tidak mau berkembang; (25) Tidak kritis; (26) Apriori terhadap gagasan orang lain; (27) Enggan menerima nilai-nilai budaya modern; (28) Jarang mengkonsumsi media massa; (29) Pendidikan relatif rendah; (30) Saat ini sudah banyak yang berpendidikan tinggi; (31) Orang muda lebih baik tingkat pendidikannya; serta (32) Pria lebih terdidik daripada wanita (*cf* Probonegoro, 1987; Yuniarti, 1996; dan Zaki Shahab,1997:138).

Masyarakat Betawi barangkali bijak jika melakukan renungan ulang faktor-faktor penyebab masih belum optimalnya kemajuan orang-orang Betawi saat ini. Namun dewasa ini, patut disyukuri begitu banyaknya generasi muda Betawi yang studi dengan tekun di perguruan-perguruan tinggi dalam program S1, S2, bahkan S3. Tetapi patutlah dicatat bahwa masih ada orang-orang Betawi yang perlu memoles sedikit perilakunya agar makin dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman (Saidi, 2015: 52)

sebab, masih kita jumpai sikap gendong tangan yang mencerminkan fatalisme—menyerah terhadap keadaan tanpa suatu usaha ubah keadaan tersebut. Gendong tangan dilakukan dalam posisi berdiri sambil menatap dengan kosong atau sambil berjalan dengan pandangan menunduk terkesan tanpa energi (Saidi, 2015:52).

“Betawi Punye Distro”: Melawan Stereotip, Mengubah *Image*

Tidak selamanya Orang Betawi yang terpinggirkan mengalami kondisi buruk secara ekonomis. Sebagaimana diakui oleh seorang tokoh masyarakat Betawi di Kemang dan orang-orang Kuningan yang pindah ke Cipete¹², kondisi mereka bahkan seringkali lebih baik dibanding sebelumnya. Ditempat baru mereka umumnya memperoleh lahan yang lebih luas dan mereka dapat menemukan mata pencaharian yang diminati serta dapat mencukupi kebutuhan hidup. Di Kemang misalnya, perubahan status Kemang sebagai Perkampungan Ekspatriat, mengubah pola kehidupan sosial orang Betawi. Dulu mereka bertani, kini mereka menyewakan lahan dan mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi hingga keluar negeri. Dari generasi-generasi inilah kemudian tampil beberapa tokoh muda Betawi yang berupaya untuk mengubah *image* tentang Betawi di tengah heterogenitas masyarakat Jakarta.

Salah satunya adalah kelompok anak muda yang mencoba membawa Budaya Betawi ke ranah industri kreatif seperti Betawi Punye Distro (BPD). BPD merupakan *distribution outlet* (distro) yang didirikan oleh anak-anak muda Betawi Kemayoran pada tahun 2013. BPD didirikan dengan tujuan untuk mengubah *image* tentang Betawi dan melawan stereotip yang dilekatkan pada orang Betawi. Komodifikasi simbol budaya dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan unik. Ekspresi simbolik yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi Betawi di tengah masyarakat Jakarta. Menurut mereka, orang Betawi saat ini bukanlah orang yang pasif menerima keadaan. BPD merupakan cara mereka untuk membangun narasi baru bahwa generasi Betawi yang sekarang adalah Betawi muda yang terdidik yang tidak lagi berada diposisi sebagai kaum marginal. Seperti diungkapkan sebagai berikut.

¹² Wawancara dengan H. Abdul Wahid (55 tahun), tokoh masyarakat di Cipete-Utara, Jakarta-Selatan, tanggal 6 November 2017

“Betawi sekarang ya Betawi nya si Doel, bukan Betawinya Mandra. Kalau ‘Betawi’nya, ini maksudnya hanya kiasan. Kan ada si Doel, ada Mandra. Mandra itu masa bodo-an. Dia ga mau open dengan sejarah, dengan apa yang dia lakuin juga mungkin cuma buat dia-dia aja. Jadi maksudnya gini, kalau orang dulu itu misalnya gini dia lahir aja ga ada arsipnye, ga punya akte segala macam. Kalau ditanya lahir lo kapan Waktu depan ada pohon kelapa, jadi masa bodo aja, masa bodo deh. Jadi hampir di semua aspek di masa bodoin, jadi dia ga mau open dengan yang lain, berbeda dengan si Doel. Doel harus intelek nih, harus meleak nih, meleknye disemua bidang. Di bidang IT-nye, di bidang apanye segala macam tuh. Udah harus, harus apa ye, menjadi suatu keharusan untuk Betawi saat ini biar dia ga dibilang orang marginal. Selama ini kan dibilangnye kaum marginal. Nah kita ga mau. Kita maunya mengikuti jaman terus.”¹³

Dengan semangat untuk merawat dan melestarikan Betawi di tengah-tengah Jakarta, mereka berupaya untuk membawa budaya lokal ke jalur industri kreatif. Menurut mereka, stereotip negatif yang masih melekat sampai sekarang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara menyelenggarakan festival (meskipun itu penting), menerbitkan Perda dan pertemuan-pertemuan antar anak-anak Betawi saja, harus ada langkah konkret untuk menghentikannya –atau paling tidak menghambat lajunya stereotip negatif pada masyarakat Betawi. Situasi inilah yang kemudian menggugah semangat mereka untuk berbuat sesuatu. Mereka berusaha untuk mengubah citra dan stereotip Betawi, dan berdiri sejajar dengan pendatang. Atas dasar hal tersebut, maka muncullah upaya menyelaraskan idealisme budaya dengan aktifitas ekonomi. Hadirnya Distro Betawi bagi orang awam seolah hal yang biasa dan wajar. Namun sebenarnya, Distro Betawi ini adalah bagian dari perlawanan terselubung terhadap stereotip yang dilekatkan pada mereka. Seperti dikemukakan informan berikut.

“Salah satu alasan kami mendirikan BPD adalah untuk mengubah image Betawi yang males, rebutan warisan kerjaannya, ya gitu deh. Nah kita semua berempat yang memang asli Kemayoran, anak Kemayoran dan orang Betawi mau merubah mindset itu. Dan itu sudah dibuktikan sebenarnya diantara kita punya temen-temen kita berempat. Yang satu ini insinyur dan dia adalah lulusan

¹³ Wawancara dengan DaviKemayoran, Pengelola BPD, 20 Desember 2016

terbaik dikampusnya, lulusan terbaik loh anak Betawi, insinyur. Nah yang satu lagi guru silat, ampe sekarang masih aktif guru silat dan aktif disetiap event atau kegiatan apapun. Jadi makanya kalau dibilang anak Betawi males udah galagi”¹⁴

Ketersingkirkan dan tidak menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri juga menjadi motivasi lain bagi mereka untuk mendirikan BPD. Seperti dikemukakan informan berikut.

Saya sih cita-citanya tuh, pengennya tuh Betawi itu tuan rumah Jakarta, harapan saya, Bang Davi, Bang Sigit, Bang Riki, juga kita nih masyarakat Kemayoran terus terang dengan lima tahun belakanganlah kaya orang asing kita lihat di sini china semua, yang aslinya ya terutama itu bisa kita itung jari orang cinanya berapa kitanya Cuma berapa? Dari mungkin 10 tahun yang lalu Betawinya masih kentel sekarang Betawinya ga ada beritanya.¹⁵

Pengelola BPD sadar bahwa idealisme gerakan budaya Betawi tidak harus menghadirkan secara fisik gerakan pencak silatnya ke tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan Ondel-ondel, yang tidak harus tampil dengan topeng serta tariannya. Lenong tidak selalu dengan wujud panggung dan lakon-lakonnya. Sudah seharusnya esensi idealisme budaya Betawi tidak dipahami dengan artian sempit, namun bisa diekspresikan dengan cara-cara yang kreatif. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menyisipkan simbol-simbol budaya Betawi melalui kaos-kaos yang mereka produksi, sehingga membuat pemakainya mengenal akan budaya Betawi. Dalam hal ini, salah satu pengelola BPD menegaskan, jika Betawi ingin maju maka harus berani keluar dari idealisme, yakni dengan melakukan terobosan-terobosan dalam menghadirkan simbol-simbol budaya Betawi di tengah masyarakat agar diterima semua golongan dan lapisan masyarakat. Ide-ide unik perlu diterapkan agar budaya Betawi kembali hadir di tengah-tengah masyarakat.

“Agar budaya Betawi bangkit, maju dan mampu melawan streotype negative, Sudah seharusnya generasi muda Betawi berinovasi dan mencoba sesuatu yang baru”.¹⁶

¹⁴Wawancara dengan DaviKemayoran, Pengelola BPD, 20 Desember 2016

¹⁵Wawancara dengan DahlanBoi, Pengelola dan Owner BPD, 6 Januari 2017

¹⁶Wawancara dengan DahlanBoi, Pengelola dan Owner BPD, 6 Januari 2017

Menurut informan, selama ini generasi muda Betawi belum berani untuk mencoba sesuatu yang baru di luar lingkungannya, padahal banyak peluang yang bisa diperoleh jika berani mencoba sesuatu yang dianggap tidak mungkin oleh kelompok sosialnya.

“Terus nyoba belajar yang memang keliatannya sulit dipelajari, memang juga harus berani juga nyoba masuk diluar lingkungannya yang bukan Betawi banget. Inovasi tersebut salah satunya dengan menghadirkan simbol-simbol Betawi melalui cara-cara kekinian”.¹⁷

Upaya untuk meningkatkan kesadaran generasi muda Betawi akan identitas budayanya yang semakin lama semakin tergerus zaman, menginspirasi pengelola BPD untuk menghadirkan simbol-simbol Betawi dalam bentuk kekinian. Simbol-simbol budaya seperti Ondel-ondel, slogan-slogan Betawi seperti “*Ape Kate Ente Aje*”, kuliner khas Betawi Kerak Telor, hingga tokoh Betawi Benyamin Suaeb dihadirkan dalam kaos-kaos keluaran BPD.

Gambar 1

Kaos dengan tema Ondel-ondel yang merupakan salah satu dari simbol budaya Betawi



Sumber: www.betawipunyedistro.com

¹⁷Wawancara dengan DaviKemayoran, Pengelola BPD, 20 Desember 2016

Gambar 2

Kaos dengan Tema Kerak Telor yang Merupakan Kuliner Khas Betawi



Sumber: www.Betawipunyedistro.com

Gambar 3

Kaos dengan Tema Tokoh Pitung yang Merupakan Tokoh yang Melegenda Bagi Orang Betawi

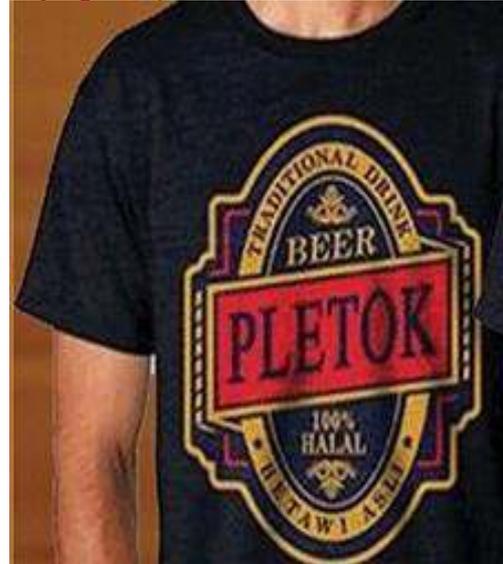


Sumber: www.Betawipunyedistro.com

Kaos adalah busana yang dipakai oleh semua kalangan usia, baik muda maupun tua. Inilah salah satu alasan mengapa kaos menjadi media utama BPD dalam melestarikan budaya Betawi. Melalui kaos, yang dapat digunakan sehari-hari, simbol budaya Betawi menjadi dekat dengan masyarakat. Tampilan desain kaos secara serius diperhatikan dengan detail. Tidak sekedar tampilan, penggunaan Bahasa Betawi juga dihadirkan dalam petunjuk ukuran kaos dan cara pencuciannya. Sebagaimana

Gambar 4

Kaos dengan Tema Bir Pletok yang Merupakan Minuman Khas Betawi



Sumber: www.Betawipunyedistro.com

lazimnya ukuran yang tertera pada lainnya kaos yang tentu punya ukuran dengan kode S untuk *small*, M untuk *medium*, L untuk *large*. Ukuran kaos yang dijual oleh BPD menggunakan kode-kode dengan Bahasa Betawi seperti kata “Sempit” untuk ukuran S, kata “Muat” untuk ukuran M, kata “Longgar” untuk ukuran L, kata “Kelonggaran” untuk ukuran XL, dan kata “Longgar Lega Lebar” untuk menunjukkan ukuran XXL. Informasi cara mencuci kaos yang dijual BPD-pun tidak berbahasa Inggris seperti kaos yang dijual di distro-distro pada umumnya, namun menggunakan Bahasa Betawi sebagai berikut:

“Nyucinya jangan pake aer yang kepanasan. Ngecek2nya jangan keras-keras. Nyetrika jangan langsung digambarnya. Kalo lo kagak ngarti juga kasiin kaos ke enyak minta tolong dicuciin dah”.

Gambar 5

Petunjuk ukuran dan cara penggunaan kaos BPD



Sumber: dokumentasi pribadi penulis

Betawi kini bukan hanya sekedar harus ‘*sigra mendusin*’ tetapi ‘*kudu mendusin*’¹⁸. Menurut informan, BPD didirikan bukan hanya bertujuan untuk membuat kebanggaan memajukan Betawi, namun juga sebagai bentuk kongrit gerakan ke-Betawi-an. Menurutnya, *Marwah* ke-Betawi-an harus disebar kepada masyarakat seperti layaknya virus. Hadirnya Betawi Punye Distro yang juga dicita-citakan oleh pemiliknya sebagai *virus* yang mampu menularkan anak-anak muda Betawi lainnya untuk membangun semangat cinta budaya yang mulai ditinggalkan anak-anak Betawi masa kini. Sebagai bentuk komitmen tersebut, mereka tidak segan-segan membagi ilmu manajemen distro kepada pemilik distro-distro Betawi lainnya. Mereka menganggap distro-distro Betawi sejenisnya sebagai mitra bersama untuk berjuang bersama mengubah stereotip negatif mengenai Betawi. Mereka merangkul pelaku distro Betawi lainnya untuk salingberbagi.

Komodifikasi Budaya: Menghadirkan Betawi, Menumbuhkan *Sense of Collectivism*

Dalam ranah akademis, upaya yang dilakukan oleh sekelompok anak muda Betawi Kemayoran ini dapat dipandang sebagai bangkitnya *sense of collectivism* dan upaya untuk menegosiasikan identitas dan merespon ketersingkirannya mereka di tengah keragaman masyarakat Jakarta. Apa yang mereka lakukan adalah upaya untuk membuat sebuah terobosan dengan menghadirkan Betawi di tengah-tengah masyarakat Jakarta yang telah didominasi oleh budaya-budaya modern dan anak-anak muda yang semakin lupa akan budaya Betawi sebagai budaya lokal di Jakarta¹⁹.

Komodifikasi budaya, menjadi pilihan bagi anak-anak muda ini untuk membawa Betawi ke jalur industri. Dalam hal ini, komodifikasi budaya berarti mengubah produk-produk budaya simbol-simbol budaya Betawi menjadi produk yang dapat dipasarkan. Cara ini menjadi pilihan mereka untuk turut serta melestarikan budaya Betawi melalui jalur

¹⁸Sebuah gerakan memajukan budaya Betawi yang terjadi di kalangan penggiat budaya Betawi. Gerakan Betawi *kudu mendusin* dikenal di daerah Kemayoran Jakarta-Pusat. Sementara gerakan serupa menggunakan slogan ‘*Sigramendusin*’. Sebenarnya menurut Dahlan kata *kudu* tingkatannya lebih tinggi dari kata *sigra*.

¹⁹Wawancara dengan Davi Kemayoran salah satu pengelola BPD, 20 Desember 2016.

industri. Niat tulus dari pengelola BPD dalam menghadirkan kembali Betawi di tengah-tengah masyarakat Jakarta ini mendapatkan respon yang cukup positif dari para konsumennya. Konsumen BPD mencakup semua kalangan dan mencapai wilayah di seluruh pelosok tanah air bahkan mancanegara. Beragam simbol budaya yang dihadirkan dalam kaos-kaos produksi BPD umumnya dianggap mampu menghadirkan *sense of collectivism* Orang-orang Betawi yang kini tengah berada di berbagai pelosok negeri maupun mancanegara. Seperti pernyataan berikut:

“Make kaos BPD bikin saya inget lagi asal usul saya. Meskipun saat ini saya tinggal jauh dari Jakarta. Namun Betawi seakan menjadi dekat dengan memakai kaos ini. Saya bangga menjadi Betawi”²⁰

“Dulu saya hanya mengenal Jakarta dengan Tugu Monas dan gedung-gedung bertingkat. Saya mengira bahwa Betawi sudah tidak lagi ada di Jakarta. Konon katanya sudah terpinggirkan akibat pembangunan. Tetapi ternyata anggapan saya salah, melalui Distro Betawi, saya tahu kalau orang Betawi masih ada dan bertahan di tengah Kota Jakarta. Saya mengenal Bir Pletok dan Kerak Telor sebagai kuliner khas Betawi, dan juga si Pitung sebagai tokoh legenda Betawi”²¹

BPD memang sukses membawa Betawi di jalur industri. Namun, menghadirkan simbol Betawi melalui jalur industri ini hanyalah dijadikan media oleh BPD untuk bisa menghadirkan simbol Budaya Betawi ke area yang lebih luas. Dalam hal ini, komodifikasi budaya tidak bisa disamakan artinya dengan hanya sekedar komersialisasi. Ini bukanlah fenomena yang muncul hanya untuk menghasilkan uang. Komodifikasi budaya mengandung makna adanya ideologisasi komoditas dan komodifikasi budaya, itu tampak seperti menjual ideologi sebagaimana halnya menjual produk (Lukens-Bull 2008). Dalam konteks ini, simbol-simbol budaya Betawi dikemas dan ditawarkan kepada khalayak yang lebih luas. Distro dengan label Betawi bisa dianggap sebagai ruang baru yang bisa dipilih sebagai sarana berjuang melawan stereotip negatif dan menghadirkan Betawi di manasaja.

²⁰Wawancara dengan salah satu pengguna kaos BPD melalui media sosial *facebook*, 22 Februari 2017.

²¹Wawancara dengan salah satu pengguna kaos BPD melalui media sosial *facebook*, 25 Februari 2017.

Dalam kerangka teoritis, apa yang dilakukan oleh pengelola BPD sebagai kelompok marginal adalah dengan apa yang disebut Miller sebagai orientasi asimilasi asertif (Miller, 2005). Dalam hal ini, mereka menyesuaikan diri dengan kelompok dominan melalui perilaku yang menegaskan hak mereka tanpa melanggar hak orang lain. Menyesuaikan diri salah satunya ditunjukkan dengan produk-produk BPD yang dikemas secara kekinian baik dalam desain ataupun proses penjualannya yang juga bisa dilakukan secara *online*. Selain itu, mereka juga memanfaatkan geliat peluang pasar yang ditawarkan melalui internet sebagai bagian dari upaya mendekati diri pada generasi milenial yang tidak pernah ketinggalan teknologi internet dan selalu memanfaatkan mediasosial. Kehadiran internet dan media sosial memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut dalam berkompetisi menyebarkan informasi atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka (Nasrullah, 2015).

Dalam melakukan gerakan ke-Betawian, mereka juga melakukan persiapan yang ekstensif dan matang (Miller, 2005). Davi, selaku salah satu pengelola distro Betawi, rela mengeluarkan uang jutaan untuk ikuti seminar-seminar motivasi dan *workshop* tentang bisnis dan *internet marketing*. Ia dan pendiri serta pengelola distro *Betawi Punya Distro* lainnya pun melakukan riset untuk simbol-simbol Betawi yang dihadirkan di kaos yang mereka produksi. Mereka juga berkunjung ketokoh-tokoh Betawi dan membayar secara profesional untuk pencipta pantun Betawi yang disematkan di kaos Betawi.

Menjadikan Stereotip sebagai Kekuatan untuk Penegasan Identitas

Pengelola BPD justru menjadikan stereotip tentang Betawi sebagai motivasi untuk mengeksploitasi lebih jauh budaya Betawi (Miller, 2005). Hasil dari proses ini dijadikan sebagai materi untuk ditransformasikan dalam produk-produk Betawi yang dijualnya. Stereotip yang mereka terima diposisikan bukan sebagai kelemahan. Namun, mereka menggunakannya untuk memperkuat solidaritas di antara mereka yang menegaskan kekuatan kultural mereka sebagai komunitas etnis di Jakarta. Mereka secara sadar mengambil-alih dan mentransformasi pemaknaan stereotip Betawi untuk memperkuat identitas mereka di tengah-tengah heterogenitas masyarakat Jakarta. Stereotip negatif tentang Betawi justru memunculkan ungkapan *jaga adat*

Betawi, tentunya yang dimaksud disini budaya luhur Betawi. Ungkapan inilah yang kemudian dikomodifikasi oleh BPD dalam bentuk souvenir berupapin.

Gambar 6

Souvenir Berupa Pin, Hasil Kreasi BPD



Sumber: Dokumentasi pribadi penulis

Kehadiran kekuatan-kekuatan luar yang bersifat dominan dan membahayakan eksistensi sebuah kelompok etnis memang bisa menjadi sumber awal lahirnya solidaritas kelompok yang dikembangkan melalui komodifikasi simbol budaya. Stereotip yang dilekatkan pada mereka memunculkan kesadaran mereka untuk lebih memahami, memaknai, dan memaksimalkan potensi mereka sebagai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap stereotip dan juga menyejajarkan diri dengan pendatang.

Transformasi mereka lakukan dengan menemukan peluang-peluang baru untuk menegosiasikan identitas kultural di tengah-tengah peradaban pasar. Mereka mengidentifikasi dan membangkitkan kembali kekayaan kultural mereka melalui cara-cara yang kreatif dan dapat diterima oleh semua kalangan. Argumen yang dikemukakan adalah untuk melestarikan dan mempertahankan jati diri etnis serta mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal dan juga untuk menegaskan kekuatan kultural mereka di tengah-tengah Kota Jakarta yang multikultural agar eksistensi mereka diakui. Bahkan, dalam perkembangan kontemporer, mereka juga berusaha menegosiasikan, mewacanakan, menyebarkan, dan memperluas ikatan identitas mereka melalui media sosial internet.

Penutup

Desakan yang dirasakan oleh Orang Betawi mendorong kehendak mereka sebagai tuan rumah di Jakarta untuk menyejajarkan diri dengan pendatang. Upaya tersebut tidak mudah, karena mereka juga harus berhadapan dengan berbagai stereotip yang dilekatkan kepada mereka. Hal inilah yang mendorong kesadaran Orang Betawi secara kolektif untuk mengejar ketertinggalan dan keterpinggiran yang berlangsung selamaini. Mereka berupaya menggali potensi diri mereka dan berupaya untuk bangkit menyejajarkan diri dengan pendatang. Mereka menyadari bahwa beragam stereotip tentang Orang Betawi dapat menghambat kemajuan mereka, karena itu, mereka berupaya mengelola stereotip tersebut dengan menjadikannya sebagai modal kekuatan untuk bangkit di tengah keterpurukan mereka. “*Betawi kudu mendusin*” adalah narasi yang mereka bangun untuk menumbuhkan *sense of collectivism* kepada generasi muda Betawi.

Industri kreatif menjadi strategi mereka untuk menghadirkan Budaya Betawi di tengah modernisasi Jakarta dan masyarakatnya yang multikultural. Simbol Budaya Betawi dikreasikan dengan cara-cara yang kreatif sebagai bentuk ekspresi identitas dan eksistensi mereka di tengah-tengah dominasi pendatang. Di sinilah upaya mereka untuk menunjukkan kemampuannya pada pendatang dan menegosiasikan posisinya. Perlawanan dilakukan dengan membangkitkan kesadaran kolektif orang Betawi melalui komodifikasi budaya. Resistensi tidak selalu berupa perlawanan secara fisik atau kasat mata, tetapi dalam bentuk simbolik yang sering secara sadar maupun tidak diterima oleh pihak lain, tak terasakan, tak dapat dilihat bahkan oleh sasarannya sendiri. Komodifikasi budaya menjadi pilihan bagi pengelola BPD untuk mengubah stereotip tentang Betawi. Mereka mengolah stereotip, menambahkan didalamnya hasil serapan pengetahuan dari eksternal, menjadikannya modal dan strategi, serta membangun *sense of collectivism* pada anak-anak muda Betawi dan upaya untuk berdiri sejajar dengan pendatang.

Daftar Pustaka

Abayasekere, S. (1985). *From Batavia to Jakarta: Indonesia's capital 1930's to 1980s*. Melbourne: Central of South East Asian Studies. Monash University.

- Abdurahman, dkk. (1975). *Permainan Rakyat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Depdikbud.
- Abeyasekere, Susan. (1989). *Jakarta: A History*, Singapore: Oxford University Press
- Amsir, Saifuddin. (2011). “*Budaya Betawi Reflika Ajaran Islam Sejati*” dalam Prosoding Kongres Kebudayaan Betawi. Jakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
- Atmadja, Nengah Bawa. (2010). *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Jakarta: LKiS.
- Aziz, Abdul. (2002). *Islam dan Masyarakat Betawi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Blackburn, Susan. (2011). *Sejarah 400 Tahun Jakarta*. Depok: Masup Jakarta.
- Buchari, Sri Astuti. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Castles, Lance. (2017). *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Chaer, Abdul. (2015). *Betawi Tempo Doeleoe: Menelusuri Sejarah Kebudayaan Betawi*. Depok: Masup Jakarta.
- Cook, S.W. (1971). “*The Effect of Unintended Interracial Contact Upon Racial Interaction and Attitude Change*.” Project No. 5-1320, Final Report Washington, DC: US Departement of Health, Education, and Welfare.
- Dwipayana, Ari. (2003). Catatan Kritis Pelaksanaan Otonomi Tingkat Desa di Bali. Dalam Abdul Gaffar Karim (Eds), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM
- Erwantoro, Heru. (2014). Etnis Betawi: Kajian Historis. *Jurnal Patanjala*, 6 (1), 1-16.
- Farlina, Nina. (2012). Representasi Identitas Betawi dalam Forum Betawi Rembug (FBR). Tesis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Susastra Universitas Indonesia
- Firmansyah, Erfi. 2012. Pengokohan Budaya Betawi sebagai Upaya Pelestarian Bahasa Sastra Betawi Kampung Sawah. Dalam Sam Mochtar Chaniago (Eds), *Problema*

- Perempuan, Bahasa, Sastra dan Kebudayaan di Asia Tenggara*. Jakarta: JBSJ Universitas Negeri Jakarta.
- Grijns.(1991). *Kajian Bahasa Melayu Betawi*. Jakarta: Grafiti.
- Halimatusa'diah. (2018). Peranan Modal Kultural dan Struktural dalam Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Bali. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 17 (1), 43-65.
- Irianto, Agus Maladi. (2016). Komodifikasi Budaya di Era Ekonomi Global terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Eksistensi Industri Pariwisata dan Kesenian Tradisional di Jawa Tengah. *Jurnal Theologia*, 27 (1),213-236.
- Judd, C.M., & B. Park. (1993). "Definition and Assessment of Accuracy in Social Stereotypes." *Psychological Review*, 100, 109-128.
- Kamuyoso, Bondan. (2007). The Dynamic of aHinterland: Ethnic Classification and Kampung Settlements in the Environs of Eighteenth-Century Batavia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Historia*, 12 (VI)
- Kamuyoso, Bondan. (2011). *Perubahan Identitas Penduduk Jakarta*. Dalam Lance Castles. *Profil Etnik Jakarta*. (2017). Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kumbara, A. Anom. (2008). Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Humaniora*, 20 (3), 315 – 326.
- Kuntowidjojo. (1996). *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya di Jawa*. Jakarta: Yayasan Festival istiqlal.
- Kusumawardhani, Ratu Arum. (2012). Liyan dalam Arsitektur Betawi: Studi Kasus pada Rumah Betawi Ora di Tangerang Selatan. Depok: Departemen Arsitektur FTUI, Pasca Sarjana Teori dan Sejarah Arsitektur, Tesis
- Lampe, Ilyas. (2017). Stereotip, Prasangka, dan Dinamika Antaretnik. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 20 (1), 17-32.
- Leirisa, R.Z. (2004). "Lahirnya Masyarakat Betawi: Jawaban atas Tantangan Kolonial" Makalah dalam *Seminar Betawi dan Jakarta: Tinjauan Budaya*. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan permuseuman DKI Jakarta
- Liliweri, Alo. (2018). *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Lohanda, Mona. (2004). "Batavia di bawah Penguasaan Kolonial" Makalah pada *Seminar Periodisasi Sejarah Masyarakat Betawi*. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan permuseuman DKI Jakarta.
- Lincoln, Yvonna S., Egon G. Guba. (2004). *Handbook of Qualitative Research* (2nd ed.).Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
- McGarty, C., V.Y. Yzerbyt, & R. Spears (eds.). (2002). *Stereotypes s Explanation: The Formation of Meaningful Beliefs about Social Groups*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Miller, Katherine. (2005). *Communication Theories Perspectives, Processes and Contexts*. Boston: McGraw-Hill.
- Muhadjir, dkk. (1986). *Peta Seni Budaya Betawi*. Jakarta: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
- Nursyifa, Aulia. (2018). Kajian *Cultural Lag* dalam Kehidupan Masyarakat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Pada Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5 (1), 1-24
- Samovar, A. Larry., Porter, E. Richard & McDaniel, R. Edwin. (2013). *Communication between Culture: 7th edition*. Boston: Wadsworth.
- Saidi, Ridwan. (2010). *Sejarah Jakarta dan Peradaban Melayu Betawi*. Jakarta: Perkumpulan Renaissance Indonesia.
- Saidi, Ridwan. (2015). *Golok Wa Item Betawi Versus Pate Hila*. Jakarta: Yayasan Renaissance.
- Sinaga, Risma Margaretha.(2014). Revitalisasi Tradisi: Strategi Mengubah Stigma, Kajian *Piil Pesenggiri* dalam Budaya Lampung. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (1): 110-126.
- Sjaf, Sofyan. (2014). *Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

- Shahab, Yasmin Zaki. (2004). *Betawi dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Shahab, Ysmine. Z. (2004). "Betawi dalam Angka dan Permasalahannya" Makalah Seminar Periodisasi Sejarah Masyarakat Jakarta: Dinas Kebudayaan dan permuseuman DKI Jakarta
- Shepherd, Robert. (2002). Commodification, culture and tourism. *Tourist Studies*, (2), 183 doi: 10.1177/146879702761936653
- Tjandrasamita, Uka. (1997). Sejarah Jakarta dari Zaman Prasejarah sampai Batavia Tahun ±1750. Jakarta: Dinas Museum & Sejarah DKI Jakarta.
- Tzanelli, R. (2008) Cultural Imitations and the Commodification of Culture: Sign Industries Makers of the 'Public Sphere'. *The Global Studies Journal*, 1 (3). 1 – 10.
- Widyastuti, Dhyah AR. (2011). Komodifikasi Upacara Religi dalam Pemasaran Pariwisata. *Jurnal Komunikasi*, Vol 1 (2): 197-208.